

Pengembangan Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA Di Bidang Ekowisata: Perspektif Indonesia

Devy Putri Kussanti

Staf Pengajar Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika
Jl. Kayu Jati 5, No 2, Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur
Email: devy.dpk@bsi.ac.id

ABSTRACT

BIMP-EAGA cooperation is a realization of regionalism institutions in the form of regional/sub-regional to reach the interest of economy, particularly trade, investment and tourism. One of the benefits of sub-regional cooperation, including the BIMP-EAGA is among the factors of geographical proximity of countries members. In the context of the tourism development the stakeholders in this BIMP-EAGA cooperation can take the advantage of this geographical factors, in addition, they also can take the benefits in other forms such as wealth in natural and beauty resources, the diverse of cultural, including traditional community property.

The BIMP-EAGA cooperation wants to develop the ecotourism concept or community-based ecotourism as a blend between the tourism sector, the environment (friendly environment) and the economic sector, namely, the empowerment of the local communities in the ecotourism management can increase their income and welfare through the development of Small and Medium Enterprises (SMEs). As a facilitator, Indonesian government has a big role to provide the primary and supporting facilities associated with the availability of adequate physical infrastructure and regulatory and the policy in the ecotourism. The benefits of ecotourism of developmental in Indonesia is to create good image of Indonesian politics in terms of nature conservations property and the environment, especially in preventing or tackling the worse impact of global warming and climate change.

Keywords: *BIMP-EAGA Cooperation, Ecotourism, Indonesia.*

ABSTRAK

Kerjasama BIMP-EAGA merupakan sebuah realisasi dari regionalisme dalam bentuk institusi regional/sub-regional untuk mencapai kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan, investasi dan pariwisata. Salah satu keunggulan kerjasama sub-regional adalah faktor kedekatan geografis antar wilayah negara-negara anggotanya. Dalam konteks kerjasama pariwisata BIMP-EAGA, para pemangku kepentingan pun memanfaatkan faktor geografis ini, selain juga keunggulan yang lain berupa kekayaan dan keindahan sumber daya alam, keragaman budaya daerah, termasuk budaya tradisional masyarakatnya.

Kerjasama BIMP-EAGA di bidang pariwisata ingin mengembangkan konsep ekowisata atau community based ecotourism sebagai konsep yang memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup dan sektor ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai fasilitator, pemerintah Indonesia berperan besar untuk menyediakan fasilitas utama maupun pendukung yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik serta regulasi dan kebijakan di bidang ekowisata. Selain keuntungan ekonomi, bagi Indonesia pengembangan ekowisata dapat membentuk citra politik Indonesia dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup secara global terutama dalam mencegah dan menanggulangi dampak lebih buruk dari *global warming* dan *climate change*.

Kata Kunci: *Kerjasama Sub-regional BIMP-EAGA, Ekowisata, Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi adalah kerjasama sub-regional atau disebut juga kerjasama ekonomi segitiga pertumbuhan (*growth triangle*).

Pada cakupan wilayah Asia Tenggara, terdapat beberapa kerjasama sub-regional, salah satunya adalah kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia- Philippines *East ASEAN Growth Area*), dimana konteks terbentuknya kerjasama sangat

erat kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi masing-masing negara anggota, dimana kepentingan-kepentingan tersebut harus bersifat komplementaritas atau saling melengkapi, sehingga dimungkinkan percepatan arus investasi dengan mesin utamanya adalah sektor swasta.

Hal tersebut penting untuk meningkatkan sektor perdagangan (eksport-impor). Meskipun prinsip komplementaritas pada dasarnya bermakna saling melengkapi dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap atau antar negara tetapi dalam kenyataannya, kerjasama atau relasi antar negara juga bersifat kompetitif. Dengan pengaruh globalisasi ekonomi, bahkan persaingan antar negara cenderung terlalu bebas atau tidak terkendali. Akibatnya, relasi antar negara termasuk prinsip saling melengkapi secara ekonomi tidak selalu berjalan simetris (atau asimetris), dimana tidak semua negara anggota suatu kerjasama ekonomi mendapatkan manfaat yang proporsional.

Dari perspektif global, kerjasama BIMP-EAGA yang berada dalam regional ASEAN merupakan upaya dalam mewujudkan konsep regionalisme kawasan. Pengembangan ekowisata merupakan wujud dari penanganan isu global, yakni isu lingkungan, apalagi dengan terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim global (*global climate change*), maka negara-negara anggota EAGA ikut terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah, yaitu melalui pengembangan kerjasama ekowisata.

Ide untuk mengembangkan ekowisata di lingkungan BIMP-EAGA masih relatif baru dan keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan dan peran berbagai pihak yaitu pemerintah, pelaku bisnis hingga masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kerjasama ekowisata di EAGA berlandaskan pada konsep pariwisata yang berbasis alam dan masyarakat. Kalau pengembangan sektor ekowisata sungguh dapat diimplementasikan dengan memperhatikan aspek lingkungan, maka kontribusi sektor ekowisata sangat penting bagi upaya pelestarian alam sekaligus dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi negara.

Pembentukan kerjasama BIMP-EAGA bagi Indonesia merupakan suatu dorongan yang besar dalam meningkatkan sektor-sektor kerjasama yang berpotensi di kawasan timur Indonesia khususnya dalam mengembangkan ekowisata (*eco-tourism*) yang berbasis *Community-Based Eco-Tourism* (CBET) melalui kawasan "*coral triangle*" yang berada di laut dan perairan Indonesia (bagian timur), selain karena hampir semua negara anggota kerjasama EAGA memiliki keindahan alam yang sangat beragam, kekayaan budaya tradisional di tiap-tiap negara berpotensi untuk dikembangkan secara komersial.

Selain itu, sebagai salah satu negara anggota kerjasama sub-regional BIMP-EAGA, mekanisme konsep ekowisata di Indonesia sejalan dengan *BIMP-*

EAGA Action Plan 2012-2016, yang memiliki tiga strategi utama pariwisata, seperti: (1) Pengembangan hasil dari komunitas dan infrastruktur yang terkait dalam *community-based ecotourism* (CBET) sebagai program unggulan. (2) Memfasilitasi peran komunitas dan sektor swasta dalam konsep ekowisata. (3) Mempromosikan BIMP-EAGA sebagai tujuan destinasi wisata.

Pembahasan dalam jurnal ini bertujuan secara umum untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari kerjasama BIMP-EAGA, khususnya dalam pengembangan di sektor pariwisata yang mengimplementasikan konsep *community-based ecotourism*. Selain itu, penelitian juga melihat kepentingan, kesiapan dan hambatan Indonesia dalam merealisasikan konsep tersebut ke dalam sektor pariwisatanya. Hal ini dikaitkan dengan upaya Indonesia dalam mengembangkan potensi ekowisata dengan potensi alam yang dimiliki provinsi-provinsi di Indonesia yang tergabung dalam kerjasama BIMP-EAGA.

II. KAJIAN LITERATUR

Kerjasama Sub-regional (BIMP-EAGA)

Pemikiran yang mendasari pembentukan kerjasama BIMP-EAGA dapat dilihat dari maksud dan tujuan para pendiri kerjasama tersebut. Dimana konsep kerjasama BIMP-EAGA teretus dari asas regionalisme, menurut Snyder (2008:228) *region* atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2007:77), dalam konteks ASEAN, sesuai dengan *Agenda for Greater Economic Integration*, pembentukan kerjasama ekonomi sub-regional didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (*open regionalism*) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup (*building block*). Pelaksanaan dan tujuan dari pembentukan dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Sedangkan tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan ialah untuk memadukan kekuatan dan potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis.

Tujuan pembentukan BIMP-EAGA ialah untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata dan investasi *intra-* dan *extra-* EAGA melalui tiga upaya yakni: (1) Perpindahan manusia, barang dan jasa, (2) Meningkatkan koordinasi di bidang infrastruktur dan

sumber daya alam, (3) Meningkatkan komplementasi ekonomi. Dalam menjalankan roda kerjasamanya, pihak swasta memberikan kontribusi yang cukup besar melalui BEBC (BIMP-EAGA *Business Council*). Dalam mengembangkan kerjasama, tiap negara anggota memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi di sektor yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan wadah untuk mengkoordinasikan potensi tersebut. Melalui *working group*, BIMP-EAGA terstruktur dalam garis koordinasi yang rapi dan sesuai.

Adapun anggota kerjasama BIMP-EAGA meliputi seluruh kesultanan Brunei Darussalam, Indonesia (14 provinsi-Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat), dua negara bagian Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) dan wilayah Federal Labuan serta Filipina (Mindanao dan Palawan). Kecuali Brunei Darussalam, kerjasama ini tidak mencakup keseluruhan wilayah negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal tersebut juga yang membedakan BIMP-EAGA dari kerjasama sub-regional yang lain di ASEAN yang mencakup keseluruhan wilayah negara.

Pariwisata berbasis Ekowisata

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2007:60), pengembangan pariwisata di Indonesia di dorong oleh kerjasama kawasan, yakni ASEAN dan kerjasama sub-kawasan atau sub-regional yang ada di dalam kawasan regional. ASEAN merumuskan strategi promosi pariwisata “*single tourism destination*” untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri pariwisata ASEAN dan meningkatkan arus wisatawan di antara negara-negara anggota.

Menurut Winantyo dan Saputra (2008:142) sebagai langkah untuk memajukan pariwisata Indonesia, para pelaku pariwisata, seperti pemerintah Indonesia (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), pihak swasta dan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang strategis dan saling berkoordinasi demi kepentingan nasional. Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya ialah melalui pembagian tugas yang jelas antara para pelaku pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah melakukan promosi dan upaya-upaya konkret seperti perbaikan infrastruktur dan keamanan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia. Selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya-upaya konkret dalam membenahan infrastruktur daerah, seperti sarana kebersihan dan promosi tujuan wisata daerahnya sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Sektor swasta melakukan investasi dan promosi

produk-produk spesifik wisata yang lebih berorientasi pada tujuan komersial. Di samping itu, dukungan masyarakat daerah berupa pemahaman mengenai konsep dan pengembangan ekowisata dibutuhkan dalam memelihara dan meningkatkan potensi budaya lokal dan nasional, peninggalan sejarah dan pelestarian lingkungan.

Menurut Supriatna (2008:378) secara konseptual, ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Masih menurut Supriatna (2008:387), ekowisata bukanlah hanya sebagai satu corak kegiatan pariwisata khusus, melainkan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian alam. Untuk itu, pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antara manusia dengan alam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan menjaga kualitas lingkungan. Oleh Karena itu, di dalam pengembangan ekowisata selanjutnya, terutama di kawasan-kawasan yang dilindungi, pengelolaan kawasan wisata alam harus benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

WWF-Indonesia dalam *Natural Treasures for Better Futures, Community-based Ecotourism in the BIMP-EAGA* (2008:2), pandangan lainnya mengenai ekowisata berasal dari IUCN (*World Conservation Union*) pada 1996, yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan dan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta tidak mengganggu keadaan alam. Perjalanan dan kegiatan wisata bertujuan untuk menikmati dan menghargai alam melalui konservasi (termasuk pelestarian kebudayaan lokal). Dengan demikian, kegiatan wisata semacam ini dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan para pengunjung atau wisatawan yang cenderung merusak alam, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi penduduk lokal.

Based on message from the World Tourism Organization in the framework of the BIMP-EAGA Community-based Ecotourism Conference, Manado, North Sulawesi, 30 October-1 November 2008, dalam penerapannya konsep *Community-based Ecotourism* memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat lokal dan tidak menutup kemungkinan dapat membantu pengurangan kemiskinan (kemiskinan pendapatan) di kawasan ekowisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Keterlibatan penyediaan saran/nasihat dan dukungan dari para ahli dibidangnya terhadap kemunculan pengusaha kecil dan menengah dalam ekowisata pada tiap tahunnya di pasar global;
2. Kerjasama diharapkan dapat memfasilitasi akses pasar dalam menghidupkan dan menghasilkan pelayanan baru dalam ekowisata, dimana ekowisata mempresentasikan peluang dalam gerakan memajukan proses pembangunan sosio-ekonomi;
3. Kerjasama memiliki peran yang besar dalam pemahaman mengenai ketetapan tipe dari operasionalisasi yang berkualitas sebagai ekowisata dan apakah *branding* atau label perlu untuk menyatakan operasional tersebut;
4. Kerjasama diharapkan dapat menyokong komunitas lokal, terutama para pelaku ekowisata yang miskin, sebagai pelaku utama dalam membangun peluang, dalam memasarkan produk, dalam mengelola operasional sehari-hari dan pembagian keuntungan ekonomi.

Menurut Supriatna (2008:379) bahwa dengan adanya pemahaman yang tepat mengenai ekowisata, maka suatu aktivitas atau perjalanan wisata mempunyai suatu arti penting. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersenang-senang dan menikmati yang telah disediakan oleh alam, tetapi lebih kepada membantu melestarikan dan menjaga sumber daya alam serta keindahannya. Sebagai salah satu konsep dalam pengembangan pariwisata, ekowisata sebenarnya telah muncul kepermukaan sudah sejak lama. Hal tersebut terlihat di negara-negara Afrika Timur seperti Kenya dan Tanzania yang memiliki Taman Nasional Emboselli dengan seekor singa sebagai penarik perhatian pengunjung. Dalam perkembangannya, konsep ekowisata mulai merambah di negara-negara Amerika, Eropa dan Asia, dengan perkembangan konsep dan realisasi yang berbeda antara satu kawasan dengan yang lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa-deskriptif, dimana penelitian menganalisa berdasarkan sumber-sumber bacaan dan hasil wawancara dengan para narasumber yang kompeten di bidang mereka masing-masing serta memaparkan secara rinci dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekowisata di Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan menjadi rekomendasi. Adapun teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui studi dokumen resmi seperti;

Roadmap to Development, Action Plan, Report Meeting, dokumen kerjasama, dokumen perkembangan proyek dan sebagainya baik yang berasal dari instansi pemerintah, sekretariat nasional, pihak swasta maupun penelusuran di internet yang sesuai dengan cakupan pembahasan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (buku, tinjauan dokumen terhadap literatur yang ada di beberapa perpustakaan perguruan tinggi negeri maupun perpustakaan nasional Jakarta, perpustakaan Kemenlu maupun sekretariat ASEAN).

IV. PEMBAHASAN

Implementasi Ekowisata di Indonesia

Dalam konteks pariwisata menuju ekowisata, Indonesia dengan beberapa implementasinya telah melibatkan diri dalam pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Perjalanan ekowisata di Indonesia telah di dorong oleh berbagai sarana dan prasarana yang mendukung seperti: realisasi pembangunan *ecoterminal* di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarna-Hatta, Cengkareng, kebijakan lintas sektoral mengenai visa, pengembangan *community base* melalui *village tourism*, penetapan standarisasi produk dan kompetensi, kampanye “Ayo Jelajah Nusantara” dan peluncuran *branding* Indonesia *The Ultimate in Diversity*.

Di Indonesia, destinasi ekowisata yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan adalah Tanjung Putting, Sentarum, Manado Tua dan Kayang Mentarang. Sedangkan dalam tataran wilayah atau objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, Indonesia memiliki kawasan taman nasional, kawasan cagar budaya seperti Taman Nasional Tanjung Puting (Kalimantan Timur), Taman Nasional Lorenz (Papua), Taman Nasional Bunaken (Sulawesi Utara) dan Toraja (Sulawesi Selatan).

Dalam pengembangan ekowisata di kawasan kerjasama BIMP-EAGA, Indonesia yang memiliki 14 provinsi sebagai anggota kerjasama telah menerapkan dan mengupayakan secara bertahap konsep ekowisata yang relative dapat dicapai dengan situasi dan kondisi Indonesia sekarang ini. Sebagai salah satu contoh dari wilayah Indonesia yang memiliki potensi dan bergerak cepat dalam pengembangan ekowisata ialah Kalimantan dan Sulawesi. Melalui pemanfaatan Taman Nasional dan Wisata Bahari yang kaya sumber daya hayati dan *biodiversity*, wilayah Kalimantan dan Sulawesi dapat dikatakan memadai dalam hal pengembangan ekowisata di Indonesia. Implementasi dari kesungguhan anggota kerjasama BIMP-EAGA khususnya Indonesia terhadap ekowisata ialah dengan

dimunculkannya inisiatif *Heart of Borneo* (HoB) dan *Sulu-Sulawesi Marine Eco-System* (SSME). Kedua inisiatif tersebut merupakan awal dari perjuangan Indonesia dalam mengembangkan kawasan pariwisata yang menuju konsep ekowisata.

1. Provinsi Kalimantan

Melalui *Declaration on the Heart of Borneo Initiative* (HoB) dalam “Tiga Negara, Satu Visi Konservasi”, Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia menyatakan diri untuk bekerjasama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan kawasan yang berupa dataran tinggi yang berada di sepanjang jantung Borneo. Luas Pulau Kalimantan merupakan 28% dari keseluruhan wilayah Indonesia, dengan memiliki potensi kekayaan alam hayati, fauna dan keindahan.

Kalimantan Timur memiliki Derawan dan Sangalaki, yang dapat dicapai dalam tiga jam dengan perahu panjang dari Tanjung Redeb. Terdapat berbagai macam fauna seperti kura-kura hijau, kura-kura merah tua, kura-kura *star fruit* dan sapi atau lembu laut. Pulau Derawan dan Sangalaki mempunyai lingkungan laut yang memukau, termasuk batu karang menakutkan, *canary crabs*, penyu hijau dan mutiara. Kawasan tanah merah Indah-Lempake merupakan sebuah Taman rekreasi dengan air terjun yang indah, lokasi berada 16 km dari Kota Samarinda serta dapat dicapai dengan mobil atau transportasi umum. Sedangkan dalam kategori olahraga, Karang Joang Balikpapan *Resort Golf and Country Club* berada dilokasi bagian pinggiran kota Balikpapan, dapat dicapai dalam waktu 20 menit dari Bandara Internasional Sepinggan-Balikpapan atau 15 menit dari kota pusat Balikpapan dan Gran Senyur Hotel.

2. Provinsi Sulawesi

Sulawesi Utara memiliki perairan Bunaken, perairan Manado Tua dan Siladen sebagai Taman Nasional Bunaken. Di pulau Manado Tua terdapat Gunung Manado Tua yang memiliki potensi ekowisata dan sebagai objek pesona gunung berapi bawah laut. Wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut tidak boleh memperlakukan biota laut ataupun lingkungan dengan sembarangan, justru mereka diwajibkan untuk melakukan kegiatan observasi dan pelestarian alam sebagai kegiatan wisata mereka.

Terdapat juga Taman Wisata Alam Tangkoko yang memiliki keunikan dibandingkan dengan tempat ekowisata lainnya. Pasalnya, di tempat inilah hidup salah satu hewan khas Sulawesi, Tarsius. Sukawesi Tenggara mempesona melalui Taman lautnya, Wakatobi, yang memiliki kekayaan *biodiversity* terbesar di dunia. Sedangkan di Sulawesi Selatan terdapat Taman Nasional Dumoga Bone,

terletak di antara Dumoga di Bolaang Mongondow dan Bone di Gorontalo. Pegunungan dan bukitnya dikelilingi oleh hutan yang lebat, membuat lokasi ini menjadi tempat yang nyaman bagi kehidupan fauna langka seperti burung maleo, anoa, burung enggang dan *tarsius spectrums* (primata terkecil di dunia).

Melalui pengembangan konsep ekowisata, Indonesia sudah harus dapat bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang berpotensi sebagai objek wisata. Indonesia mencanangkan konsep ekowisata yang didasarkan pada filosofi untuk meningkatkan kondisi alam yang sudah ada, bukan untuk merusak tatanan rantai ekosistem. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi kawasan Indonesia yang kaya sumber daya alamnya.

Adapun pelaku-pelaku dari ekowisata di Indonesia adalah:

1. Pemerintah

Pembangunan dalam setiap sektor kerjasama tentunya sangat membutuhkan campur tangan pemerintah. Hal tersebut didasari oleh kebijakan yang diterapkan untuk menjalankan kerjasama dan fungsi dari pemerintah sebagai fasilitator yang menghubungkan setiap negara anggota. Sebagai fasilitator dalam realisasi kerjasama, pemerintah memiliki konsep tersendiri dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Melalui konsep ekowisata, pemerintah ingin memunculkan sudut kepedulian terhadap lingkungan alam dan masyarakat setempat.

Pemerintah berusaha untuk menjawab tuntutan dari masyarakat lokal dengan mengadakan penyuluhan secara berkala dan bimbingan kreatifitas untuk menghadapi perkembangan dari realisasi ekowisata. Penyuluhan dalam konteks memilih wisatawan juga telah mulai dicanangkan oleh pemerintah, masyarakat harus mengetahui standarisasi latar belakang dari pengunjung yang dapat mengapresiasi tanggung jawab mereka ketika berada dalam perjalanan ekowisata. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan seluruh komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan ekowisata dapat bekerjasama dalam menjalankan konsep sesuai dengan semestinya. Peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata antara lain bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan untuk mengembangkan lima Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bitung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Taman Nasional Rinjani (Nusa Tenggara Barat) dan Taman Nasional Bunaken (Sulawesi Utara) sebagai daerah tujuan atau destinasi ekowisata.

Selain itu pemerintah juga mendirikan *training centre* dan mendatangkan para ahli kerajinan yang memberikan kursus keterampilan bagi

masyarakat lokal. Sebagai contoh, di Jalan raya desa pulutan kecamatan rembokan kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, pemerintah Minahasa di bawah pimpinan Bupati bekerjasama dengan *technical skills support dari the Canadian International Development Agency through The Private Enterprise Participation. (PEP) Projects* mengembang an kerajinan masyarakat lokal melalui *The Keramik Pulutan Training Centre*. Hal tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan konsep ekowisata yang berbasis masyarakat

2. Pihak Swasta

Sebagai *partner* pemerintah dalam mengembangkan sektor ekowisata maka peran pihak swasta dalam mengembangkan dan menciptakan suasana wisata yang nyaman serta memuaskan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Peran pihak swasta diharapkan dapat aktif dan bahkan menjadi motor utama dalam kerjasama BIMP-EAGA pada sektor ekowisata.

Dalam implementasinya, pihak swasta melalui pelaku usaha jasa *tour and travel* memberikan sumbangsuhnya berupa pelayanan paket perjalanan dan *tourist guide* melalui *website* dan buku petunjuk pedoman wisata provinsi masing-masing, misalnya:

- a. *Travel Agencies Directory of North Sulawesi Province*, merupakan buku panduan yang memuat daftar nama-nama travel agent yang berada di Sulawesi Utara. Kurang lebih terdapat 51 nama agen perjalanan yang memiliki nomor lisensi dan nomor anggota ASITA Sulawesi Utara (*Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies*) beserta nomor telepon, fax, *email*, *website* dan alamat kantor.
- b. *North Sulawesi Tourist Guide*, merupakan pedoman informasi kepariwisataan di Sulawesi Utara. Di dalamnya terdapat informasi mengenai keragaman potensi wisata seperti wisata alam, bahari, religi dan budaya, hingga budaya. Pada awal penyajian, terdapat sekilas sejarah mengenai keberadaan, situasi dan kondisi geografis Sulawesi Utara, selanjutnya terdapat tulisan berupa sejarah kelompok etnis, kepercayaan local dan sejarah para petualang penemu Sulawesi dan para peneliti bawah laut. Pada *chapter* berikutnya, seluruh kekayaan, keindahan dan keragaman alam serta budaya Sulawesi Utara dipaparkan dengan apik melalui narasi dan dokumentasi. Bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan ritual-ritual adat dan budaya tertentu dapat melihat *calendar of events* yang telah disediakan. Kelengkapan informasi dan dokumentasi yang disajikan emuat buku panduan wisata terlihat menarik.

3. Masyarakat Lokal

Selain sebagai pelaku dalam menjalankan ekowisata, masyarakat juga diharuskan untuk mengetahui dan memahami hakekat dari ekowisata. Pendidikan dan pengetahuan yang maksimal mengenai konsep ekowisata merupakan suatu faktor dalam mempercepat realisasi ekowisata. Dalam konteks pendidikan masyarakat terdapat asumsi bahwa: pendidikan berperan sebagai pencerdasan kepada masyarakat. Melalui pendidikan, akan timbul kecerdasan dari masyarakat. Jika masyarakat sudah cerdas, maka mereka akan peduli terhadap lingkungan. Ketika mereka sudah peduli, mereka akan menghasilkan sebuah proses untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai suatu komunitas yang saling bekerjasama dalam pengembangan ekowisata di Indonesia, peran masyarakat lokal bersifat langsung dalam memberikan pengarahan dan menegur para wisatawan mengenai peraturan yang diperbolehkan ataupun tidak di kawasan ekowisata. Salah satu contoh dari peran masyarakat lokal dikawasan ekowisata yakni diwilayah Pulutan, Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, masyarakat dibawah pengawasan pemerintah Minahasa dan *The Canadian International Development Agency* sebagai *technical skill support*, membuat sebuah karya berupa *souvenirs*, peralatan rumah tangga, peralatan makan, objek pariwisata lokal dan sebagainya. Kerajinan yang dihasilkan berasal dari bahan ramah lingkungan dan menggunakan metode tradisional.

4. Partner Donasi dan Investor di Indonesia

Dalam pengembangan kerjasamanya, BIMP-EAGA bekerjasama dengan ADB dan GTZ dalam memberikan bantuan teknis dalam rangka *capacity building*. Kemudian setelah itu BIMP-EAGA menerima negara bagian *Northern Territory*, Australia sebagai *partner* pembangunan.

Melalui pengembangan ekowisata, investasi berupa konstruksi, transportasi dan komunikasi serta *other services* merupakan modal awal bagi pembanguna Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kawasan timurnya sebagai destinasi wisata, perdagangan dan perekonomian yang menjanjikan.

Di bidang konstruksi, Indonesia mendapatkan investasi dari tiap-tiap negara anggota, Perancis, Spanyol dan Mauritius. Sedangkan dalam bidang jasa, investasi datang dari tiap negara anggota, Mauritius, Australia, Inggris, Belanda, Jerman Rep. Federasi, Swiss dan Amerika Serikat.

Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Ekowisata di BIMP-EAGA

1. Kepentingan Ekonomi

Perlindungan sumber daya alam hayati kehutanan yang tercantum dalam inisiatif HoB mendorong beberapa kebijakan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam sektor kehutanan besarnya pajak ekspor terhadap kayu gelondong dan rotan mendorong menurunnya proses industri kayu dalam negeri. Kebijakan yang ketat dalam penanaman hutan kembali, manajemen kehutanan yang lebih baik, metode tebang pilih dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah melakukan *eco-labeling* sebagai upaya untuk mendorong produksi pengolahan kayu dan manajemen kehutanan menuju pada sistem ramah lingkungan (*environment friendly system*).

Sebagai salah satu kontribusi pemasukan devisa negara, pariwisata Indonesia juga melihat peluang dalam mengimplementasikan konsep ekowisata sebagai usaha untuk menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan tidak menghilangkan unsur kelestarian dan perlindungan terhadap alam maka implementasi ekowisata dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber tumpuan pendapatan ekonomi dalam dunia pariwisata.

Ketika suatu negara memiliki kepentingan untuk memperoleh taraf perekonomian yang lebih baik, maka kerjasama dengan negara lain merupakan suatu solusi yang cenderung digunakan. Setiap negara pastinya memiliki kekurangan dan keunggulan potensi wilayahnya masing-masing.

3. Kepentingan Politik

Dengan melihat perkembangan stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang semakin membaik, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, memberikan rasa optimis dalam pengembangan potensi industri pariwisata di tanah air. Dalam kebijakannya, pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi yang meliputi: (1) Peningkatan kepercayaan pasar utama pariwisata terhadap citra Indonesia, melalui upaya-upaya bersama dalam mengatasi isu-isu yang mempengaruhi *country image* seperti keamanan, flu burung, lingkungan dan bencana alam; (2) Peningkatan koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan Inpres No. 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata; (3) Peningkatan partisipasi dan dukungan Pemda melalui regulasi, produk dan promosi pariwisata di daerah; (4) Peningkatan koordinasi dengan asosiasi dan industri pariwisata dalam pengembangan dan promosi pariwisata.

Kepentingan Lainnya dalam Implementasi Ekowisata di Indonesia

a. Konservasi Alam

Jika dilihat dari kontribusi sector pariwisata terhadap pemasukan devisa Negara, maka melalui potensi yang dimiliki seperti keanekaragaman flora dan fauna serta kawasan kepulauan yang indah, implementasi ekowisata di Indonesia akan memberikan kontribusi yang efektif dalam menarik minat wisatawan. Hal ini akan memberikan dampak peningkatan terhadap pemasukan devisa Negara dan perhatian masyarakat Internasional terhadap Indonesia. Selain itu, melalui konsep yang telah diusung bersama dalam kerjasama BIMP-EAGA yakni, *ecotourism based-community*, peran serta masyarakat yang diberikan dalam proporsional yang lebih tinggi akan memberikan dampak peningkatan terhadap hasil pendapatan masyarakat lokal.

Implementasi konsep ekowisata selain merupakan cara yang ramah dalam melakukan perjalanan ataupun kegiatan berwisata, tetapi juga memberikan manfaat di bidang perekonomian dan konservasi alam. Dengan adanya asosiasi GFTN (*Global Forest and Trade Network*) yang diprakarsai oleh WWF, Indonesia telah menyumbang sekitar 467.700 hektar hutan bersertifikat. Melalui GFTN Indonesia, seluruh *trade participant, forest participant*, HPH dan pihak-pihak lainnya yang terkait harus memiliki komitmen dalam pengelolaan hutan secara bertanggung jawab serta menjembatani jaringan perdagangan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.

Selain itu melalui workshop yang bertajuk “Sosialisasi Program Pengelolaan Hutan Lestari di Wilayah *Hearth of Borneo*”, fokus kegiatan tertuju pada bisnis “hijau” HPH dan revitalisasi kinerja pengelolaan demi menjaga hutan Kalimantan. Melalui program tersebut Indonesia mulai menuju pengolahan hutan yang bersertifikat dan legal.

b. Pendidikan dan Penelitian

Berdasarkan potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh kawasan timur Indonesia, selain sebagai daya tarik di bidang pariwisata, faktor pemberdayaan lainnya muncul dari kalangan peneliti ataupun pengkajian kelautan. Sebagai contoh kasus ialah dengan diadakannya *World Ocean Conference* (WOC) atau Konferensi Kelautan Dunia dan Pertemuan Tingkat Tinggi Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle Initiative* atau CTI Summit) di Manado pada 11-15 Mei 2009. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia yang berperan sebagai anggota sekaligus tuan rumah, memiliki keinginan dan ambisi untuk mewujudkan kepentingannya guna menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai wilayah yang

memiliki prospek bagus kedepannya, baik secara ekonomi, politik, pariwisata dan keilmuan. Melalui kekayaan *biodiversity*, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara telah dijadikan sebagai pusat penelitian bawah laut dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

c. Peluang Investasi

Sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh tim studi kelayakan ADB, bahwa perlu diperhatikan adanya masalah keterbatasan dan ketidakmerataan prasarana dan sarana pendukung investasi sebagai salah satu kendala utama dalam penanaman modal di kawasan kerjasama ekonomi sub-regional, khususnya yang ada di wilayah KTI dalam konteks kerjasama BIMP-EAGA. Sebagai pendukung utama dari investasi dunia usaha, sektor transportasi menjadi salah satu primadona dalam kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya beberapa MoU yang terkait dengan kerjasama dalam lingkup BIMP-EAGA yang telah menyepakati untuk mewujudkan “BIMP-EAGA *Air Linkages*” yang menerapkan kebijaksanaan “*open sky policy*” yang progresif untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi di kawasan kerjasama ini.

Terdapat tiga jenis penanaman modal di Indonesia yakni penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal non PMA/PMDN (non fasilitas).

V. PENUTUP

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota kerjasama sub-regional BIMP-EAGA dan sebagai negara kepulauan, memiliki posisi strategis yang memungkinkan untuk memanfaatkan keberadaan geografisnya yang sangat potensial. Dalam bidang pariwisata, Indonesia dapat dikatakan kaya akan sumber daya alam hayati dan kebudayaan yang beranekaragam dari Sabang sampai Merauke.

Melalui ekowisata, potensi yang dimiliki akan menjadi kekuatan yang cukup baik dalam memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki tujuan pariwisata berbasis alam dan masyarakat. Dalam implementasinya, ekowisata di Indonesia telah berkembang selain sebagai wisata alam, wisata bahari dan berolahraga alam telah menuju kearah wisata pelestarian alam dan ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat setempat, potensi menuju pembangunan nasional dan pengelolaan kawasan wisata yang bertanggung jawab.

Ekowisata di Indonesia berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun potensi atau kekayaan

sumber daya alam hayati dan keanekaragaman fauna Indonesia harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberi kontribusi yang maksimal bagi peningkatan pemasukan atau devisa negara. Untuk itu dibutuhkan waktu yang relatif panjang jika pemerintah Indonesia ingin mengadopsi konsep ekowisata secara baik dan benar. Hal ini disebabkan ekowisata bukan hanya merupakan konsep pariwisata yang mengutamakan perlindungan / konservasi alam, dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan kreatifitas lokal, melainkan juga suatu model peningkatan pendapatan daerah bukan semata-mata dari anggaran negara, melainkan dari sektor ekowisata di daerah setempat. Model atau pola sirkulasi pendapatan ini dapat diwujudkan dengan pengembangan atau memanfaatkan potensi lokal di bidang ekowisata.

Sebagai langkah untuk memajukan ekowisata di Indonesia, para pelaku pariwisata, seperti pemerintah Indonesia (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), pihak swasta dan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang strategis dan saling berkoordinasi demi kepentingan nasional. Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya ialah melalui pembagian tugas yang jelas antara para pelaku pariwisata. pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan promosi dan upaya-upaya konkret seperti perbaikan infrastruktur dan keamanan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia.

Sedangkan dalam segi keterbatasan yang dialami Indonesia dalam sarana dan prasarana darat ialah kondisi jalan yang telah diperbaiki menuju kawasan ekowisata tidak dapat bertahan lama karena konstruksi jalan dan material yang digunakan tidak sesuai standar proporsional serta tenaga ahli yang kurang berkualitas. Hal ini masih ditambah dengan beban angkutan yang berlebih serta cuaca yang mengakibatkan kondisi jalan tidak bertahan lama atau cepat rusak. Sedangkan di jalur udara dan laut juga terdapat beberapa kendala dan masih minimnya lapangan terbang Internasional di kawasan timur Indonesia dan pelabuhan yang dapat menjamin kenyamanan wisatawan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, baik dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat lokal masih harus meningkatkan perannya masing-masing dalam mengimplementasikan ekowisata, merumuskan standarisasi ekowisata, memperbanyak sosialisasi tentang ekowisata, memberikan penghargaan bagi wilayah atau daerah yang memiliki peran serta tinggi terhadap pengembangan ekowisata beserta sumber daya alam dan manusianya. Sehingga tercapai tujuan dan maksud dari pengembangan konsep ekowisata di Indonesia.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. 2007. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Snyder, Craig A. 2008. *Contemporary Security and Strategy*. Macmillan: Palgrave.
- Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Winantyo, R dan Dwi Saputra, dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia.
- BIMP-EAGA Action Plan 2012-2016.
- Bulletin Kaleidoskop 2008 of *Global Forest and Trade Network*. WWF Indonesia periode Januari-Desember 2008.
- Laporan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di kawasan timur Indonesia. Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.
- Message from the World Tourism Organization in the framework of the BIMP-EAGA Community-based Ecotourism Conference. Manado,*

North Sulawesi. 30 October-1 November 2008.

- Paper workshop ecotourism dan rapat koordinasi persiapan 5th BIMP-EAGA JTD Cluster Meeting.*
- The Center of Data Management and Network System, Minister of Culture and Tourism, Republic of Indonesia.*
- WWF-Indonesia Articles. October 2008. *Natural Treasures for Better Futures, Community-based Ecotourism in the BIMP-EAGA.*

BIODATA PENULIS

Devy Putri Kussanti, S.Sos, M.Si. Lahir di Jakarta, 13 Desember 1983. Tinggal di Tambun, Bekasi. Menyelesaikan studi S1 di FIKOM Universitas Mercu Buana jurusan Public Relations pada tahun 2006 dan S2 di FISIP Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2009. Dosen pengajar AKOM di BSI jurusan Hubungan Masyarakat.